

PENGUATAN POLICY COMMUNITY DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH PADA KOMUNITAS "KENARI INDAH" KOTA PROBOLINGGO

Wawan Edi Kuswandoro, Novy Setia Yunas*, Amin Heri Susanto

Universitas Brawijaya Malang, Malang, Indonesia

*Koresponden penulis: novysetiayunas@ub.ac.id

ABSTRAK

Persoalan sampah menjadi isu serius di berbagai daerah, termasuk Kota Probolinggo. Persoalan utamanya di Kota Probolinggo terdapat 40 ton sampah domestik per hari, namun hanya 70% yang dapat diangkut ke TPA. Kondisi pengelolaan sampah yang terbatas dan kurangnya alternatif dalam pengelolaan sampah merupakan masalah yang harus diatasi oleh semua pihak, termasuk Pemerintah, Masyarakat, dan aktor terkait. Untuk merespons permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UB diarahkan pada upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, serta mempromosikan pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan komunitas dalam pengelolaan Bank Sampah. Selain itu, tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi dan mendorong kerja sama kolaboratif dengan para pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan komunitas Bank Sampah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu penyampaian konsep kebijakan komunitas dalam workshop. Kedua, peserta akan langsung mempraktikkan konsep kebijakan komunitas serta kolaborasi dalam pengelolaan Bank Sampah. Dan yang terakhir, peserta dievaluasi oleh tim untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir. Hasilnya, bagaimana kegiatan tersebut mampu membangun pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan komunitas dalam pengelolaan Bank Sampah yang ada di Komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo.

Kata Kunci:

policy community; kolaborasi; bank sampah; pengelolaan sampah; lingkungan hidup

PENDAHULUAN

Kesadaran tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Tanpa disadari, banyak kegiatan sehari-hari berpotensi merusak lingkungan (Porman Juanda Marpomari Mahulae, 2019). Diperlukan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Terlebih lagi, isu lingkungan tidak lagi hanya lokal tetapi telah menjadi isu global dan menjadi kebutuhan seluruh masyarakat dunia (Kertati, 2018).

Pengembangan pengelolaan lingkungan hidup harus ditingkatkan oleh masyarakat melalui kesadaran dan gerakan masyarakat sipil. Masyarakat menjadi

penggerak untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para aktivis dan penggiat lingkungan hidup agar dapat bersama-sama dengan pemerintah bergerak dalam isu penyelamatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Salah satu isu lingkungan hidup yang penting namun tampak sepele adalah sampah (Wijayanti & Romas, 2020).

Pengelolaan sampah adalah masalah besar di Kota Probolinggo. Secara keseluruhan, ada 40 ton sampah domestik yang harus dikelola setiap hari di Kota Probolinggo, dengan sampah padat per orang mencapai 2,5 kg. Hanya 70% dari jumlah tersebut yang dapat diangkut ke TPA. Tiga puluh persen lainnya mungkin dibakar atau ditimbun di tempat lain dan digunakan kembali. Klasifikasi jenis sampah, berdasarkan asalnya sampah yang diangkut ke TPA Kota Probolinggo berasal dari: permukiman, pasar dan perdagangan, pembersihan jalan, taman kota, sampah di sungai, terminal, rumah sakit (non medis), hotel, restoran, dan industri. Jumlah sampah terbesar berasal dari permukiman sebesar 65,18%, disusul dari pasar yaitu 19,81%, dan dari pembersihan jalan. Meskipun dari kawasan permukiman tinja tidak dimasukkan ke dalam sampah domestik, karena baik karakteristik dan pengolahannya berbeda (Rachmansyah et al., 2021).

Untuk menangani persoalan sampah tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 39 tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota Probolinggo.

Berdasarkan persoalan yang ada, Tim pengabdian masyarakat FISIP UB memilih Kota Probolinggo untuk menjadi lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sasaran kegiatan meliputi aktivis dan pegiat lingkungan hidup di Kota Probolinggo yang tergabung dalam komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo. Bank sampah "Kenari Indah" berfokus pada pemilahan, pembelian, dan penjualan sampah anorganik, serta pengolahan sampah organik. Pengurus Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo aktif, partisipatif, dan mandiri dalam pengelolaan sampah di tingkat RT, RW, 18 komunitas sosial, dan 16 sekolah. Aktivitas utama dalam konteks ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk sampah organik dan anorganik. Upaya menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan lingkungan, juga dengan kelompok-kelompok dasa wisma dan gang-gang pemukiman penduduk untuk memberikan pendidikan dan penyadaran tentang lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah rumah tangga.

Aktivitas Bank Sampah ini tidak hanya berfokus pada jual-beli sampah anorganik seperti kertas, botol, plastik, dsb. Tetapi juga mengutamakan edukasi lingkungan hidup. Kegiatan ini mendapat respon positif dari kelompok RT, RW, gang, dan sekolah. Dari skema kegiatan ini, terbentuk komunitas di bawah pimpinan Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo. Komunitas ini melakukan aktivitas pertemuan, edukasi keliling, dan belum berkolaborasi dengan

pemerintah. Aktivitas komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo memenuhi kriteria informal governance ketika berhasil mengurus persoalan masyarakat dan merupakan sebuah komunitas untuk dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam hal kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tahun 2023 menunjukkan volume sampah organik dan anorganik mencapai lebih dari 76 ton per hari. Dan terdapat 133 depo transfer sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kondisi ini bertujuan untuk mengurangi produksi sampah di tingkat primer, yaitu rumah tangga dan pabrikaan. Aktivitas komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo memerlukan energi tambahan untuk mencapai komunitas lain di wilayah Kota Probolinggo secara lebih efisien dan terstruktur. Komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo belum memiliki sumber daya untuk melakukan komunikasi politik dalam memperjuangkan peduli sampah secara terstruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo dalam memahami Policy Community, di mana komunitas tersebut berperan sebagai civil society yang memberikan masukan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan persoalan yang dihadapi mitra tersebut, program pengetahuan tentang Policy Community, yang berfokus pada komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" di Kota Probolinggo, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi internal, kinerja jejaring sosial, dan kemampuan negosiasi serta lobbying kepada pemerintah. Komunitas ini berada di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dari permasalahan mitra yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan solusi dengan menggunakan konsep Policy Community melalui kegiatan yang pertama adalah menyampaikan konsep Policy Community dalam forum lokakarya/workshop (Muslihatin et al., 2021). Tahapan metode kedua, para peserta diajak langsung mempraktikkan konsep Policy Community serta upaya membangun kolaborasi dalam pengelolaan Bank Sampah. Pada tahap terakhir, peserta dievaluasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan sampah yang berasal dari kegiatan manusia dan mempengaruhi kehidupan di perkotaan merupakan sebuah problem yang serius. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah adalah lokasi terakhir untuk mengelola jumlah sampah yang terus meningkat, bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan. Permasalahan ini memerlukan langkah preventif dari masyarakat melalui pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan untuk mengurangi jumlah sampah dan dampak negatifnya.

Pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah dianggap sebagai alternatif konsep pengelolaan sampah yang menggunakan sistem perbankan, yaitu konsep menabung sampah. Bank sampah bertujuan untuk mengelola sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui rekayasa sosial. Sampah disimpan terlebih dahulu kemudian dikelola dengan baik oleh masyarakat agar memiliki nilai ekonomis melalui daur ulang dan/atau penggunaan ulang. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012. Peraturan tersebut kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah menjadi program pelestarian lingkungan di berbagai daerah, termasuk di Kota Probolinggo.

Di Kota Probolinggo, persoalan pengelolaan sampah merupakan hal yang serius. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, di Kota Probolinggo sampah padat yang dibuang setiap orang mencapai 2,5 kg/hari. Jumlah keseluruhan sampah domestik yang harus dikelola mencapai 40 ton/hari. Dari jumlah tersebut hanya 70% yang dapat diangkut ke TPA, sisanya 30% kemungkinan dibakar, ditimbun di berbagai tempat dan dimanfaatkan kembali. Klasifikasi jenis sampah, berdasarkan asalnya sampah yang diangkut ke TPA Kota Probolinggo berasal dari: permukiman, pasar dan perdagangan, pembersihan jalan, taman kota, sampah di sungai, terminal, rumah sakit (non medis), hotel, restoran, dan industri. Jumlah sampah terbesar berasal dari permukiman sebesar 65,18%, disusul dari pasar yaitu 19,81%, dan dari pembersihan jalan. Meskipun dari kawasan permukiman tinja tidak dimasukkan ke dalam sampah domestik, karena baik karakteristik dan pengolahannya berbeda (Rachmansyah et al., 2021).

Untuk mengatasi persoalan sampah tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah membuat kebijakan dengan Peraturan daerah kota Probolinggo nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan Walikota Probolinggo nomor 39 tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah kota Probolinggo terhadap lingkungan, khususnya pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Dengan latar belakang permasalahan sampah di Kota Probolinggo dan komitmen pemerintah dalam mengembangkan pengelolaan sampah melalui bank sampah, tim Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UB yang dipimpin oleh Wawan Edi Kuswandro bersama dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UB seperti Novy Setia Yunas dan Amin Heri Susanto, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Penguatan Policy Community dalam Pengelolaan Bank Sampah pada Komunitas "Kenari Indah" Kota Probolinggo". Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah penyampaian konsep Policy Community dalam forum lokakarya workshop. Tahapan metode kedua, peserta akan langsung mempraktikkan konsep kebijakan komunitas dalam pengelolaan Bank Sampah. Pada tahap terakhir metode ini, peserta dinilai oleh tim pengabdian masyarakat untuk menilai sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dari awal hingga akhir. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UB

bekerja sama dengan Komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Tahapan pertama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan Workshop. Workshop ini akan menampilkan penjelasan dari tim pengabdian yang memperkenalkan semangat "Kota Probolinggo bersih bebas sampah pada tahun 2025". Untuk itu, segenap unsur masyarakat, pemerintah, dan perusahaan yang hadir perlu mendiskusikan penanganan dan pengendalian sampah dalam rencana zero waste atau bebas sampah tahun 2025. Untuk penanganan sampah, masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak yang peduli lingkungan, seperti PT. Pegadaian dan PT Kutai Timber Indonesia (KTI). Masyarakat yang memiliki peluang dan keterbatasan bersama pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah. Masyarakat tidak mungkin menangani permasalahan sampah sendiri. Ini terbukti dari kerja sama antara komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" dengan para mitra. Diperlukan penguatan unsur masyarakat dengan penguatan kelembagaan bank sampah dan siapapun yang peduli tentang pengelolaan sampah. Model Bank Sampah memiliki pendekatan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah. Model ini juga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat (Sakir & Setianingrum, 2021). Persoalan sampah menjadi penting karena prestasi sebuah kota tidak akan maksimal jika masalah sampah tidak teratasi dengan baik (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Setelah menjelaskan tentang permasalahan Sampah di Kota Probolinggo dan pengembangan Bank Sampah yang sudah ada, tahap kedua dalam workshop tersebut adalah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep Policy Community (komunitas kebijakan) oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UB. Sesuai dengan konsepnya, Komunitas kebijakan lebih merupakan cara pandang alternatif yang mampu (minimal dalam pandangan para pendukungnya) merefleksikan dinamika kebijakan publik yang kian hari kian kompleks ketimbang sebagai pengganti dari perspektif-perspektif sebelumnya. Dengan pemahaman yang serupa, komunitas kebijakan berperan penting dalam mengawasi perubahan kebijakan publik (Mukhlis, 2018). Komunitas kebijakan memiliki beberapa karakter tipikal berikut: Pertama, memiliki keanggotaan yang terbatas dengan latar belakang kepentingan tertentu yang terkadang secara sadar atau tidak sadar dapat mengeksklusi kelompok lain; Kedua, memiliki nilai bersama; Ketiga, berinteraksi secara periodik; Keempat, adanya pertukaran sumber daya yang dikelola oleh para pemimpinnya; dan Kelima, adanya keseimbangan kekuasaan relatif di antara para anggotanya (Mukhlis, 2018).

Konsep-konsep dasar mengenai Policy Community (komunitas kebijakan) harus disampaikan kepada peserta di awal workshop. Hal ini karena konsep Policy Community ini sangat penting dalam memengaruhi kelompok-kelompok di luar negara terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Regilme (2018), termasuk dalam kategori ini adalah civil society, yang meliputi komunitas-komunitas sosial. Komunitas Kebijakan menampilkan spiritualitas baru di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan ikut terlibat melalui partisipasi (Hendriks & Lees-Marshmen, 2019). Negara akan berperan sebagai fasilitator yang adil,

sebagaimana yang diidealkan oleh para pemikir pluralis (Wiarda, 2014). Dengan demikian, tugas utamanya adalah memfasilitasi sebuah forum yang mampu mempertemukan aktor-aktor tersebut untuk secara bersama merumuskan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan (Barone et al., 2013). Dalam konteks isu sosial seperti lingkungan hidup, terutama persampahan, perlu keterlibatan masyarakat dan pemerintah melalui jaringan kerja sosial (Edi Kuswandoro, 2023). Dalam konteks isu lingkungan hidup, terutama sampah di wilayah mitra kerja, mitra saat ini belum memiliki referensi yang cukup untuk menjalin kerjasama institusional. Karena itu, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pengetahuan di bidang kebijakan komunitas bagi komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan fokus pada kebijakan komunitas bagi Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo, sesuai dengan kebutuhan kolaborasi dalam konteks perkembangan saat ini. Dalam workshop yang diadakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat, peserta diberikan wawasan dan motivasi untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan Bank Sampah "Kenari Indah" di Kota Probolinggo.



Gambar 1. Kegiatan Workshop Pengenalan Policy Community pada Komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo

Pemahaman dari tim Pengabdian kepada Masyarakat melalui workshop lebih fokus pada konsep policy community yang terhubung dengan collaborative governance (Donahue & Zeckhauser, 2012). Jika kita merujuk pada konsep dalam ilmu politik, keduanya umumnya memiliki karakteristik yang sama. Para pemangku kepentingan terlibat, terdapat nilai bersama yang diperjuangkan sebagai konsensus, serta keseimbangan peran dan kekuasaan dari kolaborator (Yunas & Nailufar, 2021). Meskipun demikian, konsep komunitas memiliki dimensi lebih sebagai wadah bersama (kolektif). Collaborative governance adalah sebuah proses yang terlembaga dalam forum khusus yang dapat berpengaruh terhadap keberadaan dan keberlangsungan komunitas kebijakan dalam jangka panjang (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, keberadaan komunitas kebijakan, khususnya dalam komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" di Kota Probolinggo, harus didorong oleh para pihak yang bersepakat untuk berkolaborasi.



Gambar 2. Praktik Kolaborasi pada kegiatan Workshop Pengenalan Policy Community pada Komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo yang dihadiri oleh Akademisi dari Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Kader Bank Sampah, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Perwakilan dari pihak Swasta (BUMN).

Untuk mendorong kolaborasi jangka panjang yang berkelanjutan, peserta workshop diharapkan mempraktikkan kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan Bank Sampah sesuai tahapan kegiatan. Para peserta akan menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan dengan menggunakan perspektif policy community dan kolaborasi. Praktik berbasis kasus ini terbukti efektif dalam mendorong partisipan untuk mengimplementasikan pengetahuan mereka ke dalam komunitas. Pada tahap akhir evaluasi, peserta telah memahami sepenuhnya penerapan kebijakan komunitas dalam pengelolaan atau pengembangan Bank Sampah di Komunitas Bank Sampah "Kenari Indah" Kota Probolinggo. Serta, yang paling penting juga peserta dapat memahami dengan baik cara membangun kolaborasi antara stakeholder, terutama dalam pengelolaan sampah. Sehingga, setelah ini mereka dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Sektor Swasta, NGO, Perguruan Tinggi, dan aktor lainnya untuk mengembangkan Komunitas Bank Sampah yang sudah ada sebelumnya.

KESIMPULAN

Penanganan sampah yang meliputi pengendalian dan pengolahan sampah, harus dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan semua elemen pemerintah, masyarakat, dan dunia industri/dunia usaha. Diperlukan edukasi publik secara menyeluruh tentang pengendalian dan pengolahan sampah dengan mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber primer yakni rumah tangga, industri, dan lembaga-lembaga, karena semua unit kegiatan pasti memproduksi sampah. Model bank sampah sebagai agensi pengelolaan sampah level primer lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Model ini dapat diimplementasikan melalui infrastruktur sosial seperti dasa wisma, kelompok PKK, posyandu, dan sebagainya. Fungsi bank sampah baik pada bentuk bank sampah maupun yang menempel pada organ infrastruktur sosial yang ada misalnya dasa wisma, kelompok PKK, posyandu tersebut melakukan pengolahan dan pengurangan sampah pada sumber primer sehingga mengurangi beban TPS dan TPA secara maksimal. Komunitas Kebijakan

dalam kebijakan lingkungan hidup adalah model orkestrasi peran dan fungsi stakeholders yang tergabung dalam komunitas terstruktur untuk mengelola sampah dan memberikan masukan kepada kebijakan lingkungan hidup, terutama dalam penanganan dan pengendalian sampah. Penanganan dan pengendalian sampah secara holistik melibatkan berbagai pihak dalam Komunitas Kebijakan. Proses ini dapat mengikuti model pentahelix yang mencakup fungsi penanganan sampah serta formulasi dan evaluasi kebijakan oleh komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah mendukung terselenggaranya Program Pengabdian kepada Masyarakat FISIP Universitas Brawijaya tahun 2024 ini, khususnya kepada Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) FISIP Universitas Brawijaya atas skema hibah Pengabdian kepada Masyarakat Internal FISIP UB tahun 2023. Serta apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komunitas Bank Sampah “Kenari Indah” Kota Probolinggo.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Barone, E., Ranamagar, N., & Solomon, J. F. (2013). A Habermasian model of stakeholder (non)engagement and corporate (ir)responsibility reporting. *Accounting Forum*, 37(3), 163–181.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.12.001>
- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2012). *Collaborative governance : Private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press.
- Edi Kuswandro, W. (2023). From Reluctance to Acceptation: Participation of Poor-People in Policy Implementation Using Discursive Institutionalism. *Jurnal Transformative*, 9(1), 1–21.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.1>
- Hendriks, C. M., & Lees-Marshmen, J. (2019). Political Leaders and Public Engagement: The Hidden World of Informal Elite–Citizen Interaction. *Political Studies*, 67(3), 597–617.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0032321718791370>
- Kertati, I. (2018). Merebut Pemilih Pemula. *Mimbar Administrasi*, 15(1), 9–20.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/734>
- Mukhlis, M. (2018). Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung). *Agresi*, 6(2), 139–148.
- Muslihatin, W., Purwani, K. I., Ermavitalini, D., Prasetyo, E. N., Nurhatika, S., Nurhidayati, T., Jadid, N., Febrianti, A., Yunas, N. S., Raikhani, A., & Sari, L. R. (2021). Community empowerment of Sumberpelas, Plabuan Village-Jombang to create independent and sustainable Moringa oleifera village.

- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 649(1), 1–7.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/649/1/012034>
- Porman Juanda Marpomari Mahulae. (2019). Deskripsi permasalahan upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Danau Toba Sumatera Utara. *Jurnal Inovasi*, 16(1), 11–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v16i1.130>
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1(1), 1–15.
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>
- Rachmansyah, A., Meidiana, C., Meisy, I., Rahmawati, P., Sipil, J. T., Brawijaya, U., Perencanaan, J., & Brawijaya, U. (2021). KEBUTUHAN AREA PENIMBUNAN DI TEMPAT PENGOLAHAN PROVINSI JAWA TIMUR Alumni Program Magister , Jurusan Teknik Sipil , Universitas Brawijaya , Malang. *Rekaya Sipil*, 15(2), 127–134.
- Sakir, S., & Setianingrum, R. B. (2021). Pendirian Bank Sampah Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa Singoyudan, Mirit, Kebumen. *Surya Abdimas*, 5(4), 434–442.
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1355>
- Wiarda, H. J. (2014). *Political Culture, Political Science, and Identity Politics An Uneasy Alliance*. Routledge Taylor and Francis Group.
<https://www.routledge.com/Political-Culture-Political-Science-and-Identity-Politics-An-Uneasy-Alliance/Wiarda/p/book/9781138359413>
- Wijayanti, N., & Romas, A. N. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Di Sumberagung Jetis Bantul Diy. *Jurnal Kesehatan Dan Pengelolaan Lingkungan*, 1(1), 28–38.
<https://doi.org/10.12928/jkpl.v1i1.1637>
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2021). Pemberdayaan Ruang Inovasi Kabupaten Jombang Sebagai Komunitas Pemuda Penggerak Pembangunan Desa Dalam Optimalisasi Produk UMKM. *Surya Abdimas*, 5(4), 561–572.
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1371>